



PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN UKURAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PERPAJAKAN DENGAN VARIABEL PENGENDALIAN KORUPSI SEBAGAI MODERASI PADA NEGARA BRICS

Muhammad Hafiz Fadhilah¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

1) hafiz.fadhilah@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

2) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

This study aims to determine the effect of per capita income and economic size on state revenues with the variable controlling corruption as a moderating variable. The dependent variable of this study is tax revenue, while the independent variables of this study are per capita income and economic size. The corruption control index will be used as a moderating variable that will interact with the dependent variable. This study also adds government effectiveness as a control variable for this study. The data used in this study is secondary data obtained from World Bank data with a time span from 2002 to 2019. The regression analysis used in this study is panel data regression with the model used the Fixed Effect Model. The results of this study indicate that per capita income and economic size have an effect on taxation. Based on this research, it was also found that corruption control variables that interact with per capita income and economic size strengthen their influence on revenue.

Keywords: Corruption Control, Per Capita Income, Size, Tax Revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan negara dengan variabel pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi. Variabel dependen dari penelitian ini adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi. Indeks pengendalian korupsi akan digunakan sebagai variabel moderasi yang akan berinteraksi dengan variabel dependen. Pada penelitian ini juga menambahkan efektivitas pemerintah sebagai variabel control dari penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *World Bank Data* dengan rentang waktu mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2019. Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan model yang digunakan *Fixed Effect Model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan juga bahwa variabel pengendalian korupsi yang berinteraksi dengan pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi memperkuat pengaruhnya terhadap penerimaan perpajakan.

Kata kunci: Pendapatan Perkapita, Penerimaan Pajak, Pengendalian Korupsi, Ukuran Ekonomi

PENDAHULUAN

BRICS merupakan suatu kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelompok ini terbentuk pada tahun 2009 dan merupakan kelompok yang terdiri dari lima negara berkembang yang memiliki ekonomi yang kuat dan potensial yang signifikan di dunia. Pembentukan kelompok ini memiliki tujuan Bersama untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, politik dan finansial negara anggotanya. Memperkuat pengaruh ekonomi dan politik dari negara anggotanya pada panggung dunia merupakan tujuan utama terbentuknya kelompok ini. Pada saat ini, negara-negara BRICS sudah mulai menjadi pusat ekonomi global dimana kelompok negara ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian dunia yang diperkirakan akan melampaui negara-negara G7 (Bitterhout & Simo-Kengne, 2020).

Jika dilihat menggunakan Pendapatan Domestik Bruto maka perekonomian dari negara BRICS ini mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada perekonomian dunia. Pada tahun 2019 jumlah Produk Domestik Bruto dari negara-negara BRICS sudah mendekati Produk Domestik Bruto dari negara Amerika Serikat. Jumlah Produk Domestik Bruto dari negara



BRICS ini diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dan akan melebihi Produk Domestik Bruto Amerika.

Tabel 1 Produk Domestik Bruto BRICS Tahun 2019

Country Name	GDP 2019	% World
United States	21,380,976,119,000	24.39%
Brazil	1,873,274,432,754	2.14%
Russian Federation	1,693,113,904,263	1.93%
India	2,831,552,222,520	3.23%
China	14,279,937,500,607	16.29%
South Africa	388,531,954,111	0.44%
World	87,654,250,895,446	
BRICS	21,066,410,014,255	24.03%

Sumber: World Bank, diolah penulis

Potensi pertumbuhan ekonomi di negara-negara BRICS yang tertinggi berada pada negara China yang diharapkan akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar yang ada di dunia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS didorong oleh satu kesamaan yaitu banyaknya jumlah penduduk yang berada di negara tersebut. Jumlah penduduk dari negara-negara BRICS ini mencakup 41% dari seluruh populasi dunia dimana jumlah PDB negara BRICS setara dengan 24% total PDB dunia. Tingkat PDB yang tinggi di negara BRICS ini sering kali diikuti oleh tingginya jumlah populasi dari negara BRICS tersebut, sehingga jumlah Pendapatan Perkapita dari negara BRICS jumlahnya relatif lebih kecil (Phiri, 2018).

Jika dilihat menggunakan data dari World Bank, maka angka Tax to GDP dari negara-negara BRICS memiliki tren penurunan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, penerimaan pajak negara China sebagai salah satu negara BRICS pada tahun 2019 masih memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Tabel 2 Penerimaan Pajak terhadap PDB BRICS Tahun 2019

Country	Tax to GDP (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Brazil	21.39	20.73	20.43	24.08	13.74
China	18.05	17.48	17.42	17.08	17.84
India	10.57	11.15	11.39	12.03	11.52
Russian Federation	10.64	9.18	10.29	11.47	10.98
South Africa	27.34	27.11	26.23	26.51	26.73

Sumber: World Bank, diolah penulis

Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara untuk dapat menjalankan pemerintahannya. Penerimaan pajak dibutuhkan oleh seluruh negara di dunia untuk membiayai belanja dan pengeluaran dari negara tersebut. Pengenaan dan pengadministrasian pajak yang baik dan akurat akan meningkatkan penerimaan pajak dari negara tersebut. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang baik dan optimal, maka dibutuhkan suatu sistem perpajakan yang adil serta bersih dari korupsi. Sistem perpajakan yang bersih dari korupsi akan menjaga stabilitas keuangan negara dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Stabilitas keuangan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan memaksimalkan kesejahteraan dari penduduk di negara tersebut. Penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia. Penerimaan perpajakan yang cukup dan stabil sangat diperlukan



untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Terdapat banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pengaruh variabel ekonomi terhadap penerimaan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Kitessa & Jewaria (2018), menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dalam jangka panjang berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Pada keadaan makroekonomi yang stabil, penerimaan perpajakan dari suatu negara akan meningkat seiring berjalannya waktu. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabyan dkk. (2022), dimana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Peningkatan pendapatan perkapita nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan yang diterima. Ukuran ekonomi dalam hal ini berupa produk domestik bruto juga banyak digunakan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Muibi & Sinbo (2013) menunjukkan hasil dimana ukuran produk domestik bruto memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil yang sama juga didapat oleh Permana & Nursaidah (2019) dimana produk domestik bruto mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini, pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi dijadikan sebagai variabel independen yang diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia. Pendapatan perkapita dipilih sebagai variabel independen karena dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan konsumsi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kinerja perekonomian dan penerimaan perpajakan. Sementara itu, ukuran ekonomi dipilih karena dapat mengindikasikan besarnya potensi pajak yang dapat dihasilkan oleh suatu negara.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan terkait penerimaan perpajakan pada negara BRICS. Dengan menggunakan data panel dari 5 negara BRICS pada periode 2002 sampai dengan 2019, peneliti akan mencoba untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba mengetahui hubungan dari indeks pengendalian korupsi sebagai moderasi yang akan digunakan pada penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang diharapkan untuk bisa dijawab pada penelitian ini adalah a) apakah pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak pada negara BRICS? b) apakah variabel indeks pengendalian korupsi mempunyai pengaruh ketika berinteraksi dengan variabel pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi?

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan Pajak

Menurut OECD (2023), pajak merupakan pembayaran wajib yang manfaatnya terbalas oleh pemerintah kepada pembayarinya. Maksud dari manfaatnya tidak terbalas berupa timbal balik yang dibayarkan oleh pemerintah biasanya tidak sebanding dengan pembayaran uang dibayar wajib pajak. Penerimaan pajak sendiri didefinisikan sebagai pendapatan yang dikumpulkan dari pajak atas pendapatan dan keuntungan, kontribusi jaminan sosial, pajak yang dipungut atas barang dan jasa, pajak gaji, pajak atas kepemilikan dan pengalihan properti, dan pajak lainnya. Penerimaan pajak ini merupakan bagian dari pendapatan domestik bruto yang dapat dianggap sebagai ukuran kemampuan pemerintah untuk mengatur sumber daya ekonominya.

Pungutan pajak yang dilakukan kepada masyarakat adalah upaya pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan dari negara. Meningkatnya pendapatan negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah dapat membiayai lebih banyak kebutuhan masyarakat. Negara-negara berkembang harus mampu meningkatkan pendapatan



negara agar dapat membiayai layanan yang diberikan kepada masyarakat (*International Monetary Fund*, 2012). Dengan pembiayaan tersebut nantinya negara negara berkembang akan mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan perkapita dari negaranya.

Pendapatan Perkapita

Dalam upaya membangun negara, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang harus dicapai dimana negara menginginkan adanya pertumbuhan dari ekonomi dan pendapatan perkapita pada setiap tahunnya. Pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu negara berhasil melakukan pembangunan di negaranya. Pertumbuhan ekonomi akan dibarengi peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur menggunakan produk domestik bruto. Dalam upaya memberantas kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran perlu dilakukan proses multidimensi agar mendapatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Todaro, 2013). Pembangunan ekonomi dapat dibicarakan jika pendapatan per penduduk cenderung meningkat dalam jangka panjang. Namun bukan berarti pendapatan per kapita akan selalu naik. Jika keadaan ini bersifat sementara dan kegiatan ekonomi meningkat rata-rata dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi sedang dijalankan (Sabyan dkk., 2022).

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang berkelanjutan akan menghasilkan pertumbuhan Pendapatan per kapita, yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi dari suatu negara terhadap negara lainnya. Pendapatan lebih tinggi akan menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita yang lebih tinggi yang pada akhirnya akan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Pendapatan per kapita yang diwakili oleh PDB per kapita didapatkan dari membagi produk domestik bruto dengan jumlah penduduk suatu negara (Salawali, 2021).

Ukuran Ekonomi

Dalam menghitung Produk Domestik Bruto, pendapatan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dijumlahkan seluruhnya. Untuk dapat mengetahui bagaimana komposisi dari produk domestik bruto maka produk domestik bruto akan dibagi menjadi 4 komponen diantaranya: konsumsi, investasi, belanja negara dan ekspor neto (Permana & Nursaidah, 2019). Produk domestik bruto menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara pada periode tertentu. Pada dasarnya produk domestik bruto merupakan keseluruhan nilai tambah dari bisnis yang ada di suatu negara. PDB terbagi menjadi 2, yaitu PDB atas harga konstan dan PDB atas dasar harga berlaku. PDB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga tahunan sedangkan PDB atas harga konstan dihitung berdasarkan harga satu tahun dasar. Dalam melihat pertumbuhan ekonomi maka produk domestik bruto yang digunakan adalah produk domestik bruto dengan harga konstan.

Penggunaan produk domestik bruto untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi merupakan model yang sering digunakan oleh banyak negara sebagai ukuran kesejahteraan dari penduduk negara tersebut. Dengan demikian pertumbuhan produk domestik bruto secara tidak langsung meningkatkan pendapatan penduduk sehingga akan mengubah pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Muttaqin & Halim, 2020).

Korupsi

Korupsi masih menjadi kendala utama bagi pertumbuhan di banyak negara berkembang. Pembangunan ekonomi membutuhkan dana untuk menutupi biaya pembangunan namun korupsi akan menghambat kemampuan keuangan publik untuk menghasilkan sumber daya yang memadai. Korupsi dapat mengurangi potensi basis pajak di masa depan dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat korupsi tinggi terhadap aparat pajak, maka persepsi penduduk terhadap aparat pajak akan rendah sehingga menurunkan kesadaran moral dari penduduk untuk membayar pajak. Korupsi ini tidak hanya menguras sumber daya namun juga menurunkan produktifitas publik di suatu negara (Neog & Gaur, 2021).



Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dimana sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat justru dialihkan ke proyek-proyek yang tidak ekonomis. Di negara-negara berkembang, distribusi sumber daya uang tidak merata akan memberikan batasan dalam pertumbuhan ekonomi sehingga korupsi yang terjadi akan menghambat pertumbuhan perekonomian (Parkash dkk., 2022). Ghosh dan Neanidis (2010, dalam Kaufmann dkk., 2010) mengidentifikasi tiga dampak korupsi yang dapat terjadi, diantaranya korupsi akan menurunkan pendapatan pajak rumah tangga, menambah pengeluaran publik, dan akhirnya akan menurunkan output publik. Oleh karena itu pengendalian korupsi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara.

Penelitian terdahulu

No	Judul	Pengarang	Hasil
1	Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis	Kitessa Delessa Terefe, Jewaria Teera (2018)	Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
2	Corruption, governance, and tax revenue: evidence from EAGLE countries	Arif, I. & Rawat, A. S. (2018)	Pendapatan perkapita dan pengendalian korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
3	Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011)	Muibi, S.O. & Sinbo, O. O. (2013)	Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
4	Journal of Social and Development Sciences	Makmun Syadullah; Tri Wibowo (2015)	Pengendalian korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
5	The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors	Faisal Muttaqin; Rizal Edy Halim (2019)	Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
6	PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2017	Ngadi Permana; Nursaidah (2019)	Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
7	PENGARUH PMA DAN PDB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL 2005-2015	Jefry Batara Salebu (2018)	Produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak



8	Corruption, Governance and Tax Revenue Performance in Sub-Saharan Africa	Mohammed Aminu Yaru, Ajibola Simbiat Raji (2022)	Pendapatan perkapita dan pengendalian korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
---	--	--	---

Sumber: data diolah

Hipotesis

H1 Terdapat pengaruh antara Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak.

H2 Terdapat pengaruh antara Ukuran Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak.

H3 Terdapat pengaruh antara Pengendalian Korupsi terhadap Penerimaan Pajak.

H4 Pengendalian Korupsi memoderasi hubungan Pendapatan Perkapita dan Penerimaan Pajak

H5 Pengendalian Korupsi memoderasi hubungan Ukuran Ekonomi dan Penerimaan Pajak

METODE

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data penerimaan perpajakan, pendapatan perkapita, ukuran ekonomi dan pengendalian korupsi di negara-negara BRICS di periode tahun 2002 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari World Bank.

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah penerimaan perpajakan. Data penerimaan perpajakan ini menggunakan data yang diperoleh dari World Bank dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2019. Terdapat 2 variabel independen pada penelitian ini, yaitu pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi dari suatu negara. Pendapatan perkapita menggunakan data yang diambil dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Sedangkan ukuran ekonomi dari suatu negara diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto dari negara tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Tabel 1 Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi Variabel	Keterangan
1	Penerimaan pajak	Penerimaan Pajak (% PDB)	-
2	Pendapatan perkapita	Produk Domestik Bruto dibagi dengan Jumlah Penduduk	-
3	Ukuran ekonomi	Produk Domestik Bruto	Log Natural
4	Pengendalian korupsi	Indeks Pengendalian Korupsi	Variabel Moderasi
5	Efektifitas Pemerintah	Indeks Efektifitas Pemerintah	Variabel Kontrol

Sumber: diolah penulis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian regresi data panel. Regresi data panel merupakan jenis regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Regresi data panel memiliki tiga jenis pemodelan yaitu, Common effect model, Fixed effect model dan Random effect model. Tes pemilihan model dilakukan untuk menentukan model terbaik yang menginformasikan hubungan antar variabel.

Dari pengujian model data panel, Fixed Effect Model merupakan model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model regresi ini memiliki persamaan regresi yang ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 Z_{it} + \beta_4 X_{1it} Z_{it} + \beta_5 X_{2it} Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

Y = Penerimaan Pajak

X1 = Pendapatan Perkapita

X2 = Ukuran Ekonomi

Z = Pengendalian Korupsi

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Slope Koefisien Regresi



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif terhadap variabel dependen maupun variabel independen menunjukkan nilai minimal, maksimal, rata-rata dan standar deviasi dari variabel yang akan diuji. Tabel x menunjukkan rata-rata penerimaan pajak negara BRICS terhadap PDB adalah sebesar 17,73 persen dengan angka penerimaan pajak terhadap PDB terbesar adalah sebesar 27,59 persen. Rata-rata pendapatan perkapita negara BRICS adalah sebesar 6.083,39 USD dengan angka pendapatan perkapita tertinggi sebesar 15.974,64 USD. Rata-rata ukuran ekonomi menggunakan PDB dari negara BRICS adalah 27,94 dengan angka tertinggi sebesar 30,28. Indeks pengendalian korupsi dari negara BRICS memiliki rata-rata sebesar -0,34 dengan nilai tertinggi sebesar 0,56.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel		Mean	Std. Dev	Min	Max	Observation
Penerimaan Pajak	Overall	17.73452	5.858129	8.676274	27.59604	N = 90
	Between		6.237947	10.58332	25.81888	n = 5
	Within		1.684729	9.449473	21.1239	T = 18
Pendapatan Perkapita	Overall	6083.399	3995.039	470.9868	15974.64	N = 90
	Between		3233.813	1277.526	9611.028	n = 5
	Within		2738.667	-1150.1	12447.02	T = 18
Ukuran Ekonomi	Overall	27.94774	1.058489	25.58376	30.28988	N = 90
	Between		1.008924	26.50894	29.35471	n = 5
	Within		0.5448912	26.60969	28.88291	T = 18
Pengendalian Korupsi	Overall	-0.346371	0.3983756	-1.13205	0.568106	N = 90
	Between		0.4080325	-0.940774	0.164032	n = 5
	Within		0.154965	-0.740370	0.057702	T = 18
PCIXCorr	Overall	-2438.327	4188.563	-16188.23	3058.488	N = 90
	Between		3955.47	-9269.625	805.0179	n = 5
	Within		2210.618	-9356.927	4621.694	T = 18
SizexCorr	Overall	-9.839455	11.04556	-31.50726	14.99188	N = 90
	Between		11.3155	-26.22139	4.30862	n = 5
	Within		4.291983	-21.01696	0.843808	T = 18
Eff	Overall	0.0318204	0.3036608	-0.50049	0.692696	N = 90
	Between		0.2876491	-0.303671	0.4483458	n = 5
	Within		0.1589733	-0.285741	0.4856726	T = 18

Sumber: diolah penulis

Pada model ini kemudian dilakukan uji asumsi klasik terhadap variabel yang digunakan. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel yang diujikan pada model ini tidak homogen dengan angka Prob>F sebesar 0,2326. Ini artinya variabel yang digunakan pada model ini merupakan variabel yang heterogeny. Untuk mengetahui apakah terdapat kejadian autokorelasi pada model regresi ini maka dilakukan uji Wooldridge Test terhadap variabel yang dipergunakan. Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan angka Prob>F sebesar 0,8565, sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat auto korelasi antar variabel pada model regresi ini.

Tabel 4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Pengujian	Prob
Normalitas	<i>Skewness and Kurtosis Test</i>	0,0002
Heteroskedastisitas	Breusch–Pagan/Cook–Weisberg Test	0,2326
Multikolinearitas	Variance Inflation Factor	1130,29
Autokorelasi	Wooldridge Test	0,8565



Sumber: diolah penulis

Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi dari data yang digunakan dengan menggunakan uji *skewness and kurtosis*. Uji *skewness and kurtosis* ini akan menunjukkan apakah data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji *skewness and kurtosis* diperoleh nilai $\text{Prob} > \chi^2$ sebesar 0,0002. Hal ini berarti data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Teorema limit pusat menyatakan bahwa distribusi sampel akan selalu berdistribusi normal selama ukuran dari sampel cukup besar (L. Le Cam, 1986). Dapat diasumsikan bahwa variabel yang dilakukan penelitian sebenarnya sudah terdistribusi secara normal karena ukuran sampel sudah cukup besar. Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan *Variance Inflation Factor* menunjukkan angka sebesar 1130,29, hal ini berarti terdapat multikolinieritas antar variabel pada penelitian ini. Menurut Gujarati (2006), Regresi data panel memungkinkan peneliti mempelajari model secara lebih kompleks sehingga tidak harus dilakukan pengujian dalam model data panel. Namun penulis tetap melakukan pengujian untuk mengetahui apakah model ini merupakan *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)* model.

Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak dengan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil regresi, dapat diketahui bahwa variabel independen secara bersamaan mempengaruhi Penerimaan Pajak secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai $\text{Prob} > F$ yang lebih kecil dari 0,5. Berdasarkan adjusted R-squared Penerimaan Pajak di Negara BRICS dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 16%, hal ini berarti masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi sebesar 84% di luar penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Regresi

Variabel	Coefficient	t	P > t
Cons	-65.06927	-3.44	0.001
Pendapatan Perkapita	-0.0005291	-3.10	0.003
Ukuran Ekonomi	3.159717	4.43	0.000
Pengendalian Korupsi	-51.91192	-1.88	0.064
PCIXCorr	-0.0004342	-2.06	0.043
SizeXCorr	2.150707	2.07	0.041
Eff	-5.100151	-3.53	0.001
Adjusted R-squared			0.1611
Prob > F			0.0003

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -65.06927 - 0,0005291X_1 + 3,159717X_2 - 51,91192Z_{it} - 0,0004342X_{1it}Z_{it} + 2,150707X_{2it}Z_{it} + \varepsilon_{it}$$

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel pendapatan perkapita memiliki nilai $P > |t|$ sebesar 0,003 lebih kecil daripada nilai alpha 0,05, maka hipotesis alternatif diterima yang berarti Pendapatan Perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Pengaruh negatif dari pendapatan perkapita ini berarti setiap ada kenaikan produk domestik bruto maka penerimaan pajak akan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aminu Yaru & Simbiat Raji (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dari pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif gagal dimanfaatkan oleh negara-negara BRICS untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini mungkin terjadi karena negara-negara BRICS masih bergantung pada



sumber daya alam dan sektor dominan dari negara BRICS masih didominasi oleh penduduk miskin, sehingga peningkatan pendapatan perkapita tidak dapat mendorong penerimaan pajak.

Pengaruh Ukuran Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel ukuran ekonomi memiliki nilai $P > |t|$ sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Sehingga alternatif hipotesis dapat diterima dimana ukuran ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Pengaruh dari ukuran ekonomi ini merupakan pengaruh positif sehingga setiap adanya kenaikan ukuran ekonomi maka penerimaan pajak juga akan mengalami kenaikan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana & Nursaidah (2019) dimana terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dari negara-negara BRICS yang terus meningkat akan turut meningkatkan penerimaan pajak dari negara-negara BRICS. Pertumbuhan PDB yang semakin membesar meningkatkan kemampuan untuk membeli dari penduduk negara BRICS sehingga potensi penerimaan pajak juga akan meningkat. Kemampuan negara BRICS untuk memanfaatkan momentum kenaikan PDB menentukan besarnya kenaikan penerimaan pajak dari negara BRICS.

Pengaruh Pengendalian Korupsi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel pengendalian korupsi memiliki nilai $P > |t|$ sebesar 0,064 dimana nilai ini lebih besar daripada nilai alpha 0,05, sehingga pengendalian korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian terdahulu, variabel pengendalian korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak (Aminu Yaru & Simbiat Raji, 2022) dimana pengendalian korupsi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan angka indeks pengendalian korupsi, maka angka penerimaan pajak akan mengalami penurunan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arif & Rawat (2018), angka indeks pengendalian korupsi memiliki pengaruh positif yang signifikan. Ini berarti semakin bagus pengendalian korupsi maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan turut meningkat. Hal ini dikarenakan pengendalian korupsi yang baik mampu mengurangi upaya pengelakan pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.

Pengaruh Pendapatan Perkapita yang Dimoderasi Pengendalian Korupsi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa variabel interaksi PCIxCorr memiliki pengaruh nilai $P > |t|$ sebesar 0,043 lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,0004342. Hal ini berarti indeks pengendalian korupsi yang tinggi akan mendorong pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak. Indeks pengendalian korupsi yang baik akan meningkatkan kepercayaan penduduk kepada institusi pajak sehingga secara tidak langsung menaikkan kesadaran moral penduduk terhadap perpajakan. Indeks pengendalian korupsi di suatu negara mampu memperkuat hubungan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak, ini artinya penurunan penerimaan pajak akibat kenaikan pendapatan perkapita akan semakin besar.

Pengaruh Ukuran Ekonomi yang Dimoderasi Pengendalian Korupsi Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa variabel interaksi SizexCorr memiliki pengaruh nilai $P > |t|$ sebesar 0,041 lebih kecil dari pada nilai alpha 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 2.150707. Hal ini berarti indeks pengendalian korupsi akan mendorong pengaruh ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak. Dengan pengendalian korupsi maka peningkatan penerimaan pajak akibat kenaikan ukuran ekonomi dari negara tersebut akan semakin besar.



PENUTUP

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak dengan variabel pengendalian korupsi sebagai variabel moderasi pada penelitian ini. Hasil penelitian ini juga menunjukkan secara parsial terdapat pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak. Adanya secara parsial pengaruh ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel moderasi memperkuat pengaruh dari pendapatan perkapita dan ukuran ekonomi terhadap penerimaan pajak.

Kedepannya penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan variabel *Foreign Direct Investment* sebagai salah satu variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dari negara-negara BRICS.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminu Yaru, M., & Simbiat Raji, A. (2022). Corruption, Governance and Tax Revenue Performance in Sub-Saharan Africa. *African Journal of Economic Review*, 10(1), 234–253.
- Arif, I., Khan, L., & Waqar, S. (2020). Does Corruption Sand or Grease the Wheels? A Case of BRICS Countries. *Global Business Review*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/0972150920927370>
- Arif, I., & Rawat, A. S. (2018). Corruption, governance, and tax revenue: Evidence from EAGLE countries. *Journal of Transnational Management*, 23(2–3), 119–133. <https://doi.org/10.1080/15475778.2018.1469912>
- Bayera Tujo, D. (2021). Tax revenue Determinants and Tax Efforts in Ethiopia from 2000-2019-ARDL Approach. *International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR)*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.36758/ijpamr/v7n2.2021/01>
- Bitterhout, S., & Simo-Kengne, B. D. (2020). *The effect of corruption on economic growth in the BRICS countries. A panel data analysis.* <http://www.bbc.com>.
- Cam, L. Le. (1986). The Central Limit Theorem around 1935. *Statistical Science*, 1(1), 78–96.
- Dramane, A. (2022). TAX REVENUES EFFECTS OF CORRUPTION AND GOVERNANCE IN WAEMU COUNTRIES. *JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 47(4), 143–164.
- Gyedu, S., Heng, T., Ntarmah, A. H., He, Y., & Frimppong, E. (2021). The impact of innovation on economic growth among G7 and BRICS countries: A GMM style panel vector autoregressive approach. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121169>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues.* www.govindicators.org
- Kitessa, D. T., & Jewaria, T. (2018). Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis. *Journal of Economics and International Finance*, 10(11), 134–155. <https://doi.org/10.5897/jeif2018.0924>
- Mazenda, A., & Cheteni, P. (2021). Governance and economic welfare: A BRICS panel analysis. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2), 290–299. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART9>
- Mohammed, B., Ahamed Amine, Z., & Driouche, D. M. (2021). Tax Revenues, Corruption and the Shadow Economy in Algeria: Using Asymmetric and Nonlinear Approach. *Management and Commercial Sciences Review*, 14, 311–323.



- Muib, S. O., & Sinbo, O. O. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011). *World Applied Sciences Journal*, 28(1), 27–35. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189>
- Muttaqin, F., & Halim, R. E. (2020). The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic Activities in Agriculture, Plantation, and Fisheries Sectors. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 135, 27–33.
- Neog, Y., & Gaur, A. K. (2021). Shadow economy, corruption, and tax performance: A study of BRICS. *Journal of Public Affairs*, 21(2), 1–7. <https://doi.org/10.1002/pa.2174>
- O’neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs. *Global Economics Paper*, 1–13. <https://www.gs.com>
- Parkash, R., Riaz, S., Akram, M., & Ali, M. (2022). Does corruption negatively impact economic growth of a country? Evidence from BRIC Countries. *Bulletin of Business and Economics*, 11(1), 302–312. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6647501>
- Permana, N., & Nursaidah. (2019). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2012 – 2017. *JURNAL STUDIA EKONOMIKA*, 17(1), 125–140.
- Phiri, A. (2018). Robust analysis of convergence in per capita GDP in BRICS economies ROBUST ANALYSIS OF CONVERGENCE IN PER CAPITA GDP IN BRICS. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Rasool, H., Maqbool, S., & Tarique, Md. (2021). The relationship between tourism and economic growth among BRICS countries: a panel cointegration analysis. *Future Business Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s43093-020-00048-3>
- Sabyan, M., Mainita, & Widyanti, R. (2022). PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI PMDN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA JAMBI. *JURNAL DEVELOPMENT*, 10(1), 22–63.
- Salawali, W. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kabupaten Banggai Periode Tahun 2015-2019. *JURNAL ILMIAH PRODUKTIF*, 9(2), 30–36.
- Salebu, J. B. (2018). PENGARUH PMA DAN PDB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL 2005-2015. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*.
- Singh, B. P. (2022). Does Governance Matter? Evidence from BRICS. *Global Business Review*, 23(2), 408–425. <https://doi.org/10.1177/0972150919861222>
- Syadullah, M., & Wibowo, T. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(2), 76–88.
- Younsi, M., & Bechtini, M. (2018). Economic Growth, Financial Development and Income Inequality in BRICS Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests. *Munich Personal RePEc Archive*, 1–16.